



Volume 14 Number 03 Tahun 2025

Publikasi : Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FBS, UNP

Link : <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pbs>

Analisis Wacana Kritis Pernyataan Ahmad Syahroni Anggota DPR RI Tentang “Orang Tertolol Sedunia”

Ahmad Sunardi*¹, Himawan Ardhi Ristanto², Alfiyani Aisyah², Imam Budi Prasetyo²

Universitas Harket Negeri

Email: sunardiahmad86@yahoo.co.id

ABSTRACT

Language has a real influence on life, especially political language expressed by state officials. Therefore, public response will be swift, and it can even lead to disaster and anarchy if a public figure's statement offends the public. The research method uses a critical discourse analysis approach, A. van Dijk's theory, with primary data being Ahmad Syahroni's statement. The research results are: 1) analysis of the text structure in the form of a defensive argument, rhetorical strategy: starting with an attack, softening for a moment, then reasserting dominance; 2) social cognition, in the form of hierarchical ideology, elites considering themselves superior, self-legitimizing themselves as members of the House of Representatives (DPR), and polarization; 3) social context, in the form of symbolic domination, strategies of symbolic conquest, delegitimization of criticism, and discourse used to maintain hegemony. Suggestions: state officials and public figures should develop a mature and polite language when delivering statements.

Keywords: *analysis, statement, stupid*

A. Pendahuluan

Bahasa mempunyai urgensi strategis dalam menentukan arah tujuan seseorang dalam penggunaan bahasa sesuai kepentingannya, termasuk kepentingan politik dan ideologi. Bahasa juga memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang, relasi kuasa, serta dinamika sosial dalam masyarakat. Pada ranah politik, penggunaan bahasa bahkan menjadi alat strategis untuk membangun citra, mempengaruhi opini publik, serta mempertahankan legitimasi kekuasaan (Nirmala, 2020)(Harun et al., 2024). Oleh karena itu, setiap pernyataan publik yang disampaikan oleh tokoh politik tidak hanya mencerminkan sikap personal, tetapi juga dapat merepresentasikan struktur sosial serta ideologi tertentu yang melekat dalam praktik berbahasa mereka.

Praktek penggunaan bahasa sebagai alat politik atau ideologi yang diungkapkan oleh seseorang publik figur harus hati-hati karena banyak masyarakat yang mencermati. Salah satu fenomena kontroversial berkaitan dengan penggunaan bahasa oleh politikus muncul ketika Ahmad Syahroni, salah satu anggota DPR RI, mengeluarkan pernyataan yang menyebut seseorang sebagai “orang tertolol sedunia”. Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat, media, dan berbagai pihak yang menilai bahwa ucapan seorang pejabat publik semestinya mencerminkan etika komunikasi politik yang santun, berimbang, serta menghormati nilai-nilai demokrasi. Maraknya perbincangan di ruang publik menunjukkan bahwa kasus ini tidak sekadar persoalan pilihan kata, melainkan berkaitan dengan persoalan wacana, praktik kekuasaan, dan konstruksi citra dalam komunikasi politik (Nirmala, 2020).

Ungkapan Ahmad Syahroni menarik untuk di analisis karena berkaitan dengan dampak kehidupan berbangsa dan bernegara hingga mengalami kerusuhan dan penjarahan di tahun 2025. Kontroversi ini penting dikaji karena bahasa yang digunakan oleh pejabat negara memiliki dampak langsung terhadap pembentukan opini publik dan kualitas demokrasi. Melalui analisis wacana kritis, pernyataan tersebut dapat diurai untuk melihat bagaimana relasi kuasa dilegitimasi melalui bahasa, bagaimana media membingkai (*framing*) pernyataan tersebut, serta bagaimana masyarakat menafsirkan dan merespons wacana yang dianggap merendahkan tersebut. Pendekatan analisis wacana kritis, misalnya model Norman Fairclough atau Teun A. van Dijk dapat membantu menyingkap aspek ideologis, representasi sosial, serta bentuk dominasi simbolik yang hadir dalam ujaran seorang tokoh politik (Nirmala, 2020).

Di sisi lain, penelitian ini juga penting dilakukan karena menunjukkan bagaimana komunikasi politik di Indonesia semakin dipengaruhi oleh budaya digital, di mana pernyataan pejabat publik dengan cepat menyebar dan mendapatkan reaksi dalam waktu singkat. Situasi ini memperlihatkan bahwa pejabat negara harus memiliki kesadaran pragmatik yang tinggi mengenai dampak bahasa yang mereka gunakan, terutama ketika bahasa tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial atau memperburuk kualitas dialog publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai Analisis Wacana Kritis Pernyataan Ahmad Syahroni tentang “Orang Tertolol Sedunia” menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana wacana politik terbentuk, bagaimana bahasa digunakan untuk

membangkai sebuah posisi atau identitas, serta bagaimana relasi kuasa dan ideologi bekerja melalui pernyataan seorang politisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi politik, linguistik kritis, dan literasi wacana masyarakat Indonesia agar lebih kritis terhadap penggunaan bahasa para aktor publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Analisis Wacana Kritis (AWK). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, proses, serta konteks sosial yang melatarbelakangi pernyataan Ahmad Syahroni. Sementara itu, AWK digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membangun relasi kekuasaan, ideologi, dan konstruksi makna dalam wacana politik (Nirmala, 2020).

Data primer dalam penelitian ini meliputi: 1) Pernyataan asli Ahmad Syahroni yang mengandung frasa “orang tertolol sedunia”, baik berupa teks maupun transkrip video/unggahan di media sosial. 2) Dokumen digital yang merekam pernyataan tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 1) Dokumentasi; 2) Studi Pustaka; 3) Observasi Daring

Analisis data menggunakan model AWK dengan tiga tahapan utama sebagai berikut: 1) Analisis Teks (Text Analysis); 2) Analisis Praktik Kewacanaan (*Discursive Practice*); 3) Analisis Praktik Sosial (*Social Practice*) [5].

Prosedur penelitiannya sebagai berikut: 1) Menentukan fokus penelitian pada pernyataan Ahmad Syahroni; 2) Mengumpulkan pernyataan asli dan data terkait; 3) Mengumpulkan pemberitaan media dan interaksi publik di media sosial; 4) Mengolah data dalam bentuk teks; 5) Melakukan analisis teks menggunakan konsep linguistik; 6) Menganalisis praktik kewacanaan untuk melihat produksi dan konsumsi wacana; 7) Menganalisis praktik sosial untuk mengungkap ideologi dan relasi kuasa [6].

C. Pembahasan

Berdasarkan analisis wacana kritis dengan menggunakan teori A. Van Dijk maka diperoleh 3 analisis. Ketiga analisis tersebut adalah analisis berdasarkan struktur teks, analisis kognisi sosial, dan analisis konteks sosial [7].

1. Analisis Struktur Teks

Analisis struktur teks adalah analisis tekstual menyangkut mikro struktur dan makro struktur [8]. Analisis struktur teks berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ahmad Syahroni selaku anggota DPR RI dengan hasil analisis sebagai berikut.

a. Tema dan Gagasan Utama (Makrostruktur)

Tema utama pernyataan yang diungkapkan oleh Ahmad Syahroni selaku anggota DPR RI adalah **pembelaan lembaga DPR** melalui kritik keras terhadap masyarakat yang mengusulkan “bubarkan DPR”. Syahroni membangun narasi bahwa:

1. DPR adalah lembaga yang sah dan bekerja untuk rakyat.
2. Kritik boleh, tetapi usulan pembubaran dianggap sebagai tindakan “**mental orang tolol sedunia**”.
3. DPR tetap akan berdiri meskipun menerima caci maki.

Gagasan utama: legitimasi lembaga DPR + delegitimasi kritik radikal dengan bahasa penghinaan.

b. Skema (Superstruktur)

Pernyataan Ahmad Syahroni selaku anggota DPR RI disusun dengan pola **argumen-defensif**, yaitu:

1. **Penghinaan awal**

“Mental orang tertolol sedunia...”

2. **Penjelasan pembelaan DPR**

Kritik boleh tetapi ada “adat istiadat”.

3. **Pelunakan seolah pro-kritik**

“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat nggak apa-apa...”

4. **Penguatan kembali penghinaan**

“Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu orang tolol sedunia.”

5. **Legitimasi diri & lembaga**

DPR bekerja, punya empati, punya tata kelola.

6. **Penutup berupa klaim kekuatan lembaga**

“Mau mengkritik sampai mampus juga DPR tetap berdiri.”

Struktur ini menunjukkan strategi retorik: **mulai dengan serangan, sempat melunak, lalu menegaskan kembali dominasi.**

c. Pilihan Kata (Mikrostruktur)

Beberapa ciri linguistik penting:

(1) Kata-kata bernilai evaluatif dan merendahkan

- “Tolol”, “anjing”, “babi”, “bangsat”, “mampus”
Digunakan untuk *mendelegitimasi* pengkritik, sambil menunjukkan *kekuasaan verbal*.

(2) Penggunaan generalisasi

- “Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu tolol sedunia.”
Menggeneralisasi seluruh pengusul menjadi kelompok yang sama → strategi *othering*.

(3) Penguatan diri (self-positive representation)

- “Kita punya kerja-kerja, punya empati...”
- “Kerja masyarakat mumpuni...”

Ini adalah strategi van Dijk: **positive self-presentation, negative other-presentation**.

(4) Kontras semu (pseudo-contradiction)

Syahroni seolah membuka ruang kritik:

“Kita boleh dikritik mau bilang anjing, babi bangsat... nggak apa-apa.”

Tetapi kemudian:

“Jangan mencaci maki berlebihan karena merusak mental.”

Kontradiksi ini adalah strategi retorik untuk membingkai **DPR sebagai lembaga yang toleran**, tetapi tetap memonopoli batasan kritik.

2. Kognisi Sosial

Kognisi sosial adalah cara pembicara memproses dan mereproduksi pandangan. Teun van Dijk menekankan bahwa wacana lahir dari pengetahuan, keyakinan, dan ideologi pembicara (Pakpahan, 2024).

Dalam kasus ini, tampak bahwa:

a. Ideologi elit politik

Syahroni menempatkan DPR sebagai:

- lembaga yang sah,
- berwenang,

- lebih memahami tata kelola pemerintahan dibanding masyarakat biasa.

Kognisi sosialnya merefleksikan keyakinan bahwa:

- masyarakat tidak memahami mekanisme pemerintahan,
- kritik pembubaran kelembagaan dianggap ancaman,
- posisi DPR berada di atas masyarakat dalam hal pengetahuan.

Ini disebut **ideologi hierarkis**, di mana elit menganggap dirinya superior.

b. Justifikasi kekuasaan

Ia berkali-kali menegaskan DPR punya “kerja-kerja” dan “empati”, meskipun tanpa bukti konkret. Ini adalah upaya **legitimasi diri**, sebuah mekanisme kognitif untuk membuat publik menerima dominasi.

c. Representasi negatif terhadap lawan wacana

Dalam kognisi sosial Syahroni, pihak yang mengusulkan pembubaran DPR dianggap:

- emosional,
- tidak berpendidikan politik,
- irasional,
- berbahaya bagi stabilitas pemerintahan.

Ini selaras dengan konsep van Dijk tentang **polarization**:

- *ingroup*: DPR → positif, rasional, bekerja.
- *outgroup*: pengkritik radikal → tolol, tidak beradab.

3. Konteks Sosial (sosiopolitik)

a. Relasi kekuasaan

Wacana muncul dari seorang **anggota DPR**, posisi dengan otoritas politik tinggi. Ketika seorang pejabat publik menggunakan bahasa agresif dan merendahkan:

- ia sedang memperlihatkan **dominasi simbolik**,
- memosisikan masyarakat sebagai subordinat.

Van Dijk menyebut ini **abuse of power through discourse**.

b. Situasi sosial Indonesia

- Tingginya kritik publik terhadap DPR (kasus UU, etik, korupsi, kinerja, dsb.).
- Meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.
- Munculnya narasi “bubarkan DPR” sebagai ekspresi frustrasi.

Pernyataan Syahroni adalah respons defensif terhadap krisis legitimasi DPR.

c. Wacana penghinaan sebagai alat kontrol

Penggunaan kata-kata kasar dari pejabat adalah bentuk:

- **strategi penaklukan simbolik,**
- **delegitimasi kritik** dengan cara merendahkan intelektualitas pengkritik,
- pembatasan diskursus publik agar tetap dalam koridor yang “aman” bagi kekuasaan.

Ini konsisten dengan konsep van Dijk: **wacana dipakai untuk mempertahankan hegemoni.**

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis wacana kritis teori Teun A. Van Dijk, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. **Struktur teks** menunjukkan pola pembelaan lembaga dan serangan verbal terhadap pengkritik. Syahroni menampilkan diri (DPR) sebagai pihak superior dan rasional, sedangkan pengusul pembubaran DPR digambarkan sebagai tolol, tidak beradab, dan tidak mengerti politik.
2. **Kognisi sosial** memperlihatkan ideologi elitisme, yaitu keyakinan bahwa DPR lebih tahu dan lebih mampu mengatur negara. Kritik yang mengarah pada pembubaran dipersepsi sebagai ancaman terhadap otoritas.
3. **Konteks sosial** memperlihatkan ketegangan antara publik yang kehilangan kepercayaan pada DPR dan pejabat yang berusaha mempertahankan legitimasi. Wacana kasar digunakan sebagai strategi kontrol dan dominasi politik.

Secara keseluruhan, wacana ini mencerminkan **relasi kuasa yang timpang**, di mana pejabat negara menggunakan bahasa penghinaan untuk meneguhkan posisi hierarkis serta menekan kritik publik.

Daftar Rujukan

- Anggrianto, F. (2022). *Analisis Wacana Kritis (Kajian Eufemisme dan Disfemisme dalam Wacana)*. Unitomo Press.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=i84qEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=analisis+wacana+kritis+&ots=3S2PuloaC8&sig=csOc2g8rSwuDyKBqHXhRJ4ojTTg&redir_esc=y#v=onepage&q=analisis wacana kritis&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=i84qEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=analisis+wacana+kritis+&ots=3S2PuloaC8&sig=csOc2g8rSwuDyKBqHXhRJ4ojTTg&redir_esc=y#v=onepage&q=analisis%20wacana%20kritis&f=false)
- Durri Yatul Luma, R. S. (2022). *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid Durri Yatul Luma, Rr. Sulistyawati Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA*. 8(13), 177–189.
- Harun, H., Anisa Maulidiah Alam, & Jufri, J. (2024). Analisis Wacana Kritis pada Pidato Presiden Tahun 2022: Model Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 169–181. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3163>
- Nirmala, V. (2020). *GAYA BAHASA DALAM IKLAN KOMERSIAL DI TELEVISI* (pp. 1–12). Balai Bahasa Sumatera Selatan.
<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/bidar/article/view/3184/1425>
- Pakpahan, S. J. (2024). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk Pada Teks Berita Liputan6.com mengenai Perubahan Seragam oleh Kemendikbudristek*. 4(1), 85–94.